

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG MITIGASI BENCANA
DI KOTA BATU
(Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan
Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh:

DANIEL SUDI MOGU

2018210193

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Mitigasi Bencana Di Kota Batu belum optimal. dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi masih kurang merata, sumber daya manusia, dan sarana prasarana masih belum ada penambahan. Faktor penghambatnya adalah dari segi anggaran, sumber daya aparatur yang masih kurang. Faktor pendukung adalah adanya regulasi atau peraturan tentang penanggulangan bencana, adanya kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam melaksanakan tugas dengan baik, serta nilai kemanusiaan dari masyarakat masih tinggi, ketika terjadi bencana mereka saling gotong royong untuk bantu parah korban bencana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Mitigasi Bencana

Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geologis yang cenderung rawan bencana, hal ini dikarenakan Indonesia berada pada persentuhan antara lapisan tektonik, dan hutan belantara yang memiliki dua musim, khususnya badai dan kemarau (<https://bnpb.go.id> , 2019). Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020 terdapat 2.939 bencana yang hampir melanda seluruh wilayah Indonesia dan tercatat ada lebih dari 6,4 juta orang yang menderita dan tumbang, 409 orang hilang, dan 536 orang terluka. Terlepas dari bencana yang disebabkan oleh fenomena alam, pada tahun 2020 penyebaran Covid-19 akan berubah menjadi bencana publik non alam, dengan dampak meninggal lebih dari 200 ribu orang (Sumber: <https://bnpb.go.id>, 2020; buku KP IRBI 2020). Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu strategi atau langkah untuk membatasi bahaya yang dihadapi. Sebab itu, untuk mengatasi hal demikian diperlukan suatu kebijakan untuk meminimalisir resiko-resiko yang dihadapi. Dengan demikian, dikeluarkanlah UU No. 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana, yang dalam pasal 18 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah dituntut mengadakan BPBD. Batas wilayah dalam penanggulangan bencana harus mengacu pada kerangka Nasional Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pedoman turunannya.

Kebijakan penanganan bencana merupakan salah satu dari keseluruhan pembangunan nasional, yakni hubungan aktivitas penangkalan bencana, antara bencana yang dilakukan pengurus, sebelumnya, selama, dan setelah bencana yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam mengelola bencana yang sering

terjadi. tidak terlalu muda, dalam siklus pelaksanaannya banyak hal yang dialami, penanggulangan bencana seharusnya terus dilaksanakan agar meminimalisir dampak/efek yang ditimbulkan bencana serta melakukan penyadaran terhadap masyarakat tentang mitigasi bencana, yakni dengan cara melaksanakan sosialisasi lebih giat mengenai mitigasi bencana mulai dari sebelum bencana, ketika bencana, dan sesudah bencana. Meski demikian, BPBD Kota Batu jarang mengadakan sosialisasi terkait mitigasi bencana, sehingga saat terjadi bahaya efeknya jauh lebih ekstrim dan menimbulkan korban jiwa. Berlandaskan latar belakang itu, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Mitigasi Bencana Di Kota Batu”.

1.1. Rumusan masalah

Berdasarkan landasan di atas, masalah penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang mitigasi bencana di Kota Batu?
2. Apa saja permasalahan yang tampak dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Batu?

1.2. Tujuan penelitian

Mengingat rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tentang mitigasi bencana di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan tentang penanggulangan bencana di Kota Batu.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil dari peneliti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi beberapa pihak. Adapun manfaat dari peneliti tersebut, yaitu sbb:

a. Manfaat teoritis dan praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan ilmu sosial dan ilmu administrasi publik, serta mengembangkan teori kebijakan public dalam pengurangan resiko atau mitigasi bencana di Kota Batu.
- 2) Sebagai pertimbangan untuk pembuatan draft usulan mengenai kebijakan public di bidang penanggulangan bencana, dan rencana, serta implikasi pelaksanaan meminimalisir resiko bencana terutama dalam mitigasi bencana.

b. Manfaat untuk Masyarakat

Memberikan kontribusi inovasi kebijakan public dalam penerapan meminimalisir resiko bencana (mitigasi) di Kota Batu dan memberikan informasi untuk masyarakat dalam menyiapkan diri serta kesiapsiagaan menghadapi bahaya dalam mitigasi bencana.

c. Manfaat bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan bisa menjadikan suatu bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam dan sosial yang terjadi di lingkup masyarakat terutama dalam mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. 2021. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung: Angkasa
- Amri, Mohd. Robi, dkk. 2016. *Risiko Bencana Indonesia (RBI)*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ariyanti, Indyah Hayu. 2015. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif Tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. *Skripsi*. Surabaya: ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Bakornas PB. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia*. Jakarta Pusat: Direktorat Mitigasi Bandung.
- DEPDAGRI. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003. Tentang *Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah*. Jakarta: Direktorat Perlindungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa.
- Desfandi, M. (2014). Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2).
- Fadhli, Aulia. 2019. *Mitigasi Bencana*. Yogyakarta: Gava Media.
- Faturahman, Burhanudin Mukhamad. 2018. “Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik”. *Ublisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(2): 122-134.
- Islamy, Irfan. 2019. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Lestari, Ayu & Daniati Hi Arsyad. 2021. "Implementasi Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Tolitoli". *Ejournal Media Bina Ilmiah* 16(1): 6125-6130.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.

Muhammad, Feny Irfany dan Yaya M Abdul Aziz. 2020. "Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot". *Jurnal Ilmu Administrasi*. 11(1): 50-60.

Nugraha, dkk. 2020. "Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang". *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*. 5(2): 49-59.

Nugroho, Sigit Spto, dkk. 2020. *Hukum Mitigasi Bencana Di Indonesia*. Klaten: Lakeisha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.

PP Nomor 23 Tahun 2008 Tentang *Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*

PP Nomor 3 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*

- Putera, Roni Ekha, dan Tengku Rika Valentina, Siti Annisa Silvia Rosa. 2020. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang”. *Jurnal Ilmu Administrasi* 9(2): 155-167.
- Sakti, Pandu, Faizal Anwar, dan Rekho Adriadi. 2020. “Analisis Penerapan Program Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah”. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration*. 2(1):39-44.
- Sanjaya, Sang Putu Adi & I Nyoman Budiana. 2020. “Implementasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Provinsi Bali”. *SOROT: Jurnal Ilmu ilmu Sosial*. 15(1): 1-11.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kaantitatif, dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, Syahputra Adisanjaya dan Nurliana Cipta Apsari. 2017. Peran Stakehoulder Dalam Bencana Banjir. *Prosiding KS: Riset dan PKM*. 4(1): 53-59.